BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapal merupakan sarana penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan laut yang memiliki peranan vital terhadap perekonomian nasional. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut sebagai jalur utama distribusi barang dan mobilitas manusia. Oleh karena itu, setiap kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki dokumen resmi yang menunjukkan kebangsaan dan legalitasnya. Salah satu dokumen krusial adalah surat tanda kebangsaan kapal, yang membuktikan bahwa kapal tersebut adalah milik Indonesia sesuai dengan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Triwahyuni, 2021).

KSOP Utama Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia memiliki volume permohonan penerbitan Surat Laut yang tinggi. Untuk mendukung kelancaran pelayanan, penerbitan Surat Laut telah diintegrasikan dengan aplikasi pelayanan administrasi kapal**.** Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi tersebut belum sepenuhnya optimal**.**

Percepatan transformasi digital di sektor pelayaran di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik kepelabuhanan. Dokumen kebangsaan kapal seperti Surat Laut kini tidak hanya menjadi persoalan legal-formal, tetapi juga sangat bergantung pada keandalan sistem aplikasi pelayanan elektronik yang digunakan oleh instansi pelaksana, termasuk KSOP

Utama Tanjung Priok. Dasar teknis penerbitan dan pendaftaran kebangsaan kapal diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017, yang juga mengarahkan pemanfaatan mekanisme elektronik (SPKE/Inaportnet/SIM) dalam proses administrasi pendaftaran kapal.

Kondisi riil di lapangan mengindikasikan beberapa kelemahan strategis pelayanan yang berimplikasi langsung pada proses penerbitan Surat Laut:

1. Gangguan sistem (*downtime/error*) yang mengakibatkan penundaan layanan;
2. Ketidaksinkronan data antar-sistem sehingga memunculkan kebutuhan input ulang dan verifikasi manual;
3. Fitur upload/validasi dokumen yang kurang fleksibel**,** mempersulit pemenuhan persyaratan oleh pemohon dan
4. Keterbatasan kapabilitas monitoring & pelaporan yang menghambat manajemen kinerja layanan.

Dampak gabungan dari kelemahan-kelemahan ini adalah meningkatnya waktu penyelesaian, beban administrasi manual pada petugas, serta menurunnya kepuasan dan kepastian hukum pengguna jasa. Temuan serupa tercatat dalam kajian tentang implementasi aplikasi manajemen perkapalan Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) dan studi kasus penerapan sistem di kantor-kantor KSOP/KP3 yang menyarankan perbaikan kualitas sistem serta peningkatan kapasitas pengguna.

Secara strategis, kelemahan aplikasi pelayanan bukan sekadar masalah teknis operasional hal tersebut berimplikasi pada kedaulatan administrasi kebangsaan kapal**,** efisiensi logistik nasional, dan citra layanan pelabuhan internasional. Ketidakpastian dan keterlambatan penerbitan

Surat Laut dapat mengganggu jadwal operasi kapal, menimbulkan risiko hukum (ketidakjelasan status kebangsaan), serta menurunkan daya saing pelabuhan sebagai node logistik utama. Oleh karena itu, analisis yang menggabungkan kajian proses (prosedur administratif), aspek teknis aplikasi (sistem informasi), dan perspektif pengguna (pemilik/agen kapal) perlu dilakukan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang bersifat teknis-operasional maupun kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, proses penerbitan Surat Laut tidak terlepas dari sejumlah tahapan administratif dan teknis, mulai dari pemeriksaan dokumen, verifikasi data kapal, hingga penerbitan surat resmi oleh pejabat berwenang di KSOP.Di KSOP Utama Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia jumlah kapal niaga yang mengurus dokumen kebangsaan sangat tinggi, sehingga efektivitas dan ketepatan prosedur menjadi h al yang sangat penting. Namun, di lapangan sering dijumpai beberapa kendala seperti keterlambatan proses, kelengkapan dokumen yang belum sesuai, serta hambatan teknis dan koordinasi antarbagian.

Surat laut merupakan dokumen penting yang menunjukkan identitas dan kebangsaan sebuah kapal niaga. Dokumen ini berperan sebagai bukti sah secara hukum bahwa kapal tersebut terdaftar dan diakui oleh negara. Di Indonesia, penerbitan surat laut dilakukan oleh instansi berwenang seperti Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di berbagai pelabuha n utama, termasuk KSOP Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk di tanah air.

Selain sebagai dokumen identitas kapal, surat laut juga berfungsi sebagai jaminan bahwa kapal memenuhi persyaratan teknis dan legal untuk beroperasi sesuai dengan peraturan maritim nasional dan internasional. Dalam konteks ini, KSOP Utama Tanjung Priok memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh kapal niaga yang

beroperasi di wilayah kerjanya benar-benar memenuhi standar keselamatan dan administrasi yang berlaku. Seiring dengan meningkatnya volume arus barang dan kapal di pelabuhan ini, penerbitan surat laut menjadi bagian yang sangat vital dalam mendukung kelancaran logistik dan perdagangan nasional (Aditya, 2025).

Namun, kompleksitas prosedur dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi kadang membuat proses penerbitan surat laut menjadi lama dan rumit. Hal ini tidak hanya berpotensi menghambat aktivitas pelayaran, tetapi juga dapat menimbulkan risiko hukum jika dokumen yang diterbitkan tidak akurat atau tidak tepat waktu.

Penerbitan Surat Laut diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pelayaran serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur persyaratan, tata cara, dan dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal. KSOP Utama Tanjung Priok sebagai kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan di pelabuhan utama bertugas menerapkan prosedur penerbitan (Yusnidah, 2024).Surat Laut berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk verifikasi dokumen resmi seperti grosse akta pendaftaran kapal, surat ukur, dan dokumen lain yang relevan.

Oleh karena itu saya mengambil, penelitian dengan judul “Analisis Proses Penerbitan Surat Laut sebagai Tanda Kebangsaan Kapal Niaga di KSOP Utama Tanjung Priok” ini dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana prosedur tersebut berjalan, kendala apa yang muncul dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KSOP untuk meningkatkan pelayanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik administrasi maritim di pelabuhan utama Indonesia serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pelayaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerbitan Surat Laut di KSOP Utama Tanjung Priok?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan Surat Laut dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam penerbitan Surat Laut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menge tahui proses penerbitan Surat Laut di KSOP Utama Tanjung Priok.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan Surat Laut dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam penerbitan Surat Laut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Menambah wawasan ilmiah tentang administrasi dan hukum maritim,khususnya terkait penerbitan surat laut sebagai tanda kebangsaan kapal niaga.
2. Manfaat praktis

   Bagi KSOP Utama Tanjung Priok, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur penerbitan surat laut.
3. Manfaat akademis

   Menjadi bahan pembelajaran tentang implementasi aturn maritim di Indonesia,khususnya dalam konteks kebangsaan kapal.